



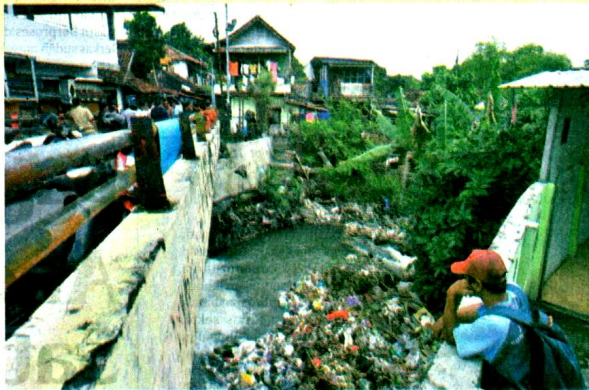
Ketua Pansus Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Kota Jogja Krisnadi Setyawan

Dorong Digitalisasi Perpajakan, Usulkan Sampah Jadi Sumber Pendapatan

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Krisnadi Setyawan serius menyoroti pembengkakan anggaran belanja pengolahan sampah di Kota Jogja. Sehingga, anggota DPRD Kota Jogja Fraksi Partai Gerindra ini mengusulkan agar pemerintah kota (pemkot) bisa menjawab tantangan bahwa sampah bisa menjadi sumber pendapatan.

KRISNADI mengatakan, Kota Jogja berada di titik persimpangan antara pelestarian identitas budaya dan percepatan urbanisasi. Dalam lima tahun terakhir, peningkatan jumlah wisatawan dan investasi di sektor properti telah memberikan kontribusi besar pada pendapatan asli daerah (PAD). Namun menimbulkan berbagai permasalahan. Seperti kemacetan, meningkatnya volume sampah, dan kesenjangan ekonomi.

Oleh karena itu, dia berharap kebijakan perpajakan dan retribusi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Namun juga dapat diarahkan untuk program pembangunan yang lebih adil dan inklusif, khususnya bagi masyarakat kategori rentan.



MENUMPUK: Warga melihat kondisi Sungai Buntung yang dipenuhi sampah di Kampung Bangunrejo, Jogja kemarin (16/6).

Hal tersebut juga menjadi atensi bagi legislatif.

Bahkan sejak 14 Januari lalu, DPRD Kota Jogja sudah memulai pembahasan tentang Perubahan Perda 10/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Materi pokoknya berupa lima hal perubahan.

Di antaranya perubahan skema pemungutan retribusi sampah, perubahan batas peredaran usaha dari objek PBTJ atas makanan dan/atau minuman, serta penambahan layanan di RSUD, puskesmas, laboratorium kesehatan, dan RS Pratama.

Selain itu juga ada perubahan

beberapa penyebutan pada jenis layanan dalam perda sebelumnya. Serta terakhir berupa penambahan layanan baru dan penghapusan beberapa layanan. Latar belakang perubahan regulasi tersebut tidak lain untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan digitalisasi. "Digitalisasi sistem perpajakan diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan wajib pajak," ujar Krisnadi kemarin (16/6).

Digitalisasi ini, juga bisa diterapkan pada pengelolaan sampah. Khususnya dalam sistem pemungutan retribusi sampah

yang lebih adil dan proporsional. Selama ini, skema retribusi belum mencakup kebutuhan dan variasi jenis layanan kebersihan yang diberikan kepada masyarakat.

Terlebih dengan adanya kebijakan desentralisasi dan penutupan TPA Piyungan. "Meningkatkan biaya pengelolaan sampah, tetapi pendapatan retribusi hanya empat persen dari biaya pengelolaan," bebernnya.

Pada idealnya, pendapatan retribusi harus berkisar 30-40 persen untuk bisa menutupi biaya pengelolaan sampah. Sebelum desentralisasi, biaya

pengolahan sampah untuk *tipping fee* pembuangan sampah ke TPA Piyungan hanya Rp 24.383 per ton. Dengan total biaya pengelolaan sampah pada APBD Kota Jogja TA 2024 sebesar Rp 31,7 miliar.

Namun pasca-desentralisasi, biaya pengolahan sampah melonjak 20 kali lipat. Pengolahan sampah RDF memerlukan biaya Rp 1,1 juta per ton, kerja sama dengan mitra swasta Rp 480 ribu per ton, dan biaya penggunaan insenerator Rp 500 ribu per ton.

Total biaya pengelolaan sampah dari APBD Kota Jogja dan bantuan keuangan khusus (BKK) danais pada 2024 mencapai Rp 70,9 miliar. Sedangkan target pendapatan dengan tarif retribusi yang berlaku saat ini hanya senilai Rp 3,9 miliar. Namun realisasinya di angka Rp 2,9 miliar.

Pada jika diolah dengan benar, sampah juga mampu menjadi pendapatan daerah. Seperti sampah yang diubah menjadi bahan bakar minyak. Dia pun pernah mengujinya pada Juli 2024 lewat pirolisis. Hasil dari sampah yang menjadi solar itu, bisa digunakan untuk operasional kendaraan.

Dalam uji coba itu juga dilakukan uji emisi pada asap kendaraan yang hasilnya nilai opasitas asapnya hanya 6-8 persen. Sedangkan jika menggunakan BBM pabrikan nilai opasitas asapnya 14 persen.

Menurut Krisnadi, model pengolahan tersebut bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk menjadikan sampah sebagai sumber pendapatan baru. Sekaligus menjadi langkah menentukan teknologi tepat guna yang murah dan menghasilkan produk bernilai tinggi harus. (*/inu/eno/by)



Kami berharap sampah akan diselesaikan oleh Pak Hasto dan Pak Wawan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. DPRD akan terus me-monitoring sejauh mana progres penyelesaian sampah, dari minggu per minggu."

KRISNADI SETYAWAN
Ketua Pansus Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Kota Jogja



DOCUMENTASI PRIBADI

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005